

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2018 dapat diselesaikan, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun 2018.

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2018 merupakan capaian akuntabilitas kinerja pada tahun terakhir dalam masa RENSTRA Tahun 2013.-2017 dan Perubahan Renstra Tahun 2018, LKj Tahun 2018 disusun berdasarkan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2018 yang dijabarkan dari Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA Tahun 2018).

LKj Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 86 Tahun 2017. Penyusunan LKj Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2018 merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Komitmen dalam penyusunan LKj Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya.

Cakupan LKj Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2018 terdiri atas : Pendahuluan, Perencanaan & Perjanjian Kinerja, Akuntabilitas Kinerja dan inovasi dalam skema reformasi birokrasi. Pendahuluan memiliki muatan uraian singkat organisasi, seperti : latar, maksud, isu strategis, dan struktur serta keragaman sumberdaya manusia di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Adapun aspek Perencanaan dan Perjanjian Kinerja menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, IKU dan PK. Sedangkan

---

aspek akuntabilitas kinerja, memberikan gambaran capaian, analisa, dan evaluasi terhadap indikator kinerja utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun 2018, termasuk atas analisa efisiensi penggunaan sumberdaya.

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas-tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2018 telah banyak membuahkan hasil yang positif. Dari 3 Indikator Kinerja Utama, yang ketiganya sudah mencapai sesuai yang ditargetkan. Namun untuk pelaksanaan kedepannya masih perlu dilaksanakan peningkatan target yang akan dicapai agar pencapaian kinerja bisa terus ditingkatkan. Analisa dan evaluasi atas capaian kinerja secara komprehensif digunakan sebagai pijakan untuk melakukan perbaikan pelayanan dan mendukung tercapainya good governance pada masa mendatang. Berkenaan dengan itu, LKj Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2018 ini, dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Watampone, 11 Februari 2018

Kepala Dinas Penanaman Modal  
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



**Drs. MUHAMMAD AKBAR, MM**

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19660717 198603 1 009

## **1.1 LATAR BELAKANG**

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj dilakukan dengan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Proses penyusunan LKj dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu LKj menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan.

---

Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2017, LKj tingkat SKPD disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selambat-lambatnya dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.

## **1.2 MAKSUD DAN TUJUAN**

LKj Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun secara sistematis dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKj juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

LKj Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan proses untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran yang selanjutnya dianalisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKj, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LKj sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

## **1.3 GAMBARAN UMUM ORGANISASI**

### **1.3.1 Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Bone tahun 2016 , tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6), yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Bone Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas

---

dan fungsi serta tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone.

Tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Bone sesuai Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 sebagaimana disebutkan diatas adalah sebagai berikut :

- Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
**Tugas pokok** : membantu Bupati dalam melaksanakan kebijakan daerah bidang Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Fungsi:**

- Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, perizinan dan non perizinan;
- Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, perisiann dan non perizinan;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, perizinan dan non perizinan;
- Pelaksanaan administrsi dinas urusan pemerintahan bidang penanaman modal, perizinan dan non perizinan;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas dibantu oleh 1 (satu) Sekretaris, dan 6 (enam) Kepala Bidang dan 23 (dua Puluh Tiga) Tim Tekhnis.

- Sekretaris  
**Tugas pokok** : membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas koordinasi dibidang kesekretariatan yang menjadi tanggung jawab kedinasan

---

**Fungsi :**

- Penyusunan program dan anggaran pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - Pelaksanaan program dan anggran;
  - Pengoordinasian tugas tugas pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan memberikan pelayanan administrasi kepada bidang bidang lain pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - Penyusunan bahan dokumentasi dan statistik, peraturan perundang undangan, pengelolaan bahan bacaan dan penyelenggaraan kemitraan dengan masyarakat;
  - Penyusunan data, evaluasi dan penyiapan laporan pelaksanaan program kerja kepada Kepala Dinas;
  - Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga;
  - Penyelenggaraan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
  - Pelaksanaan pembinaan ASN di lingkungan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
  - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait tugas dan fungsinya.
- Bidang Pengkajian, pengembangan dan kebijakan penanaman modal  
**Tugas pokok :** melaksanakan urusan pengkajian, pengembangan dan menyusun kebijakan di bidang penanaman modal.

**Fungsi :**

- Penyiapan dan pengkajian peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan pengembangan yang berkaitan dengan Penanaman Modal;
- Penyiapan penyusunan penetapan kebijakan pengembangan penanaman modal dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal Daerah dan Rencana Strategis Daerah sesuai dengan program pembangunan Pemerintah Daerah, Provinsi, dan Pusat;

- 
- Pelaksanaan pengkajian, perumusan, dan penyusunan kebijakan serta pedoman tata cara pelaksanaan penanaman modal;
  - Penyusunan dan perumusan pemberian insentif khusus penanaman modal sesuai dengan kewenangan daerah;
  - Penyusunan rencana program pendidikan dan pelatihan pengembangan penanaman modal;
  - Penyusunan laporan pelaksanaan tugas bidang; dan
  - Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.
- Bidang Kerjasama, Promosi Dan Pelayanan Penanaman Modal  
**Tugas pokok :** menyelenggarakan segala urusan kerjasama, promosi dan pelayanan penanaman modal sesuai dengan kewenangan daerah

**Fungsi :**

- Penyiapan rencana kerjasama dan promosi penanaman modal;
  - Penyiapan dan mengkoordinir pelayanan penanaman modal;
  - Penyiapan dan mempelajari regulasi penanaman modal terkait dengan kerjasama, promosi dan pelayanan;
  - Pelaksanaan promosi peluang investasi di Kabupaten Bone;
  - Penyiapan bahan-bahan promosi penanaman modal;
  - Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bidang; dan
  - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.
- Bidang Data, sistem informasi, pengendalian dan pelaksanaan penanaman modal  
**Tugas pokok:** menyelenggarakan segala urusan data, sistem informasi, pengendalian dan pelaksanaan penanaman modal

---

**Fungsi :**

- Penyiapan dan menyusun rencana kegiatan sistem informasi, data dan peluang investasi serta pengendalian dan pelaksanaan penanaman modal;
  - Penyusunan dan membuat peta penanaman modal;
  - Penyusunan dan menyiapkan kebijakan teknis peluang investasi penanaman modal;
  - Penyiapan data investor / penanaman modal di Kabupaten Bone;
  - Pelaksanaan monitoring pelaksanaan pelaporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM);
  - Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bidang; dan
  - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.
- Bidang informasi, pengaduan dan pelayanan perizinan
- Tugas pokok :** menyelenggarakan segala urusan informasi perizinan, pengaduan perizinan, dan pelayanan perizinan dengan prinsip pelayanan terpadu satu pintu.

**Fungsi :**

- Penyiapan dan penyusunan kebijakan teknis pelayanan informasi dan pengaduan perizinan.
- Pengordinasian aparatur di tiap loket pelayanan pada *Front Office*.
- Pengelolaan pengaduan yang muncul akibat penyelenggaraan pelayanan.
- Perumusan dan penyiapan bahan dan data pelayanan perizinan dengan prinsip penyederhanaan.



- 
- Penyiapan fasilitas pelayanan yang *user friendly*.
  - Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bidang.
  - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya
- Bidang pengkajian dan pemrosesan perizinan  
**Tugas pokok** : untuk mengkaji dan memproses penerbitan permohonan perizinan

**Fungsi :**

- Penyusunan dan merumuskan segala kebijakan teknis penerbitan izin, serta mempelajari segala peraturan perundang-undangan terkait hal-hal teknis perizinan;
  - Pengordinasian Tim Kerja Teknis dalam rangka proses penerbitan izin dan peninjauan lapangan;
  - Penyiapan bahan dan fasilitas dalam proses penerbitan izin;
  - Pengordinasian aparatur yang bertugas di *Back Office*;
  - Pelaksanaan verifikasi dan validasi atas kebenaran dokumen permohonan;
  - Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bidang; dan
  - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait tugas dan fungsinya.
- Bidang Monitoring dan Evaluasi

**Tugas pokok** : menyelenggarakan segala urusan monitoring dan evaluasi pelayanan perizinan serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan

---

**Fungsi :**

- Penyiapan dan merumuskan kebijakan teknis terkait monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu;
- Pengumpulan, mempelajari regulasi dan mengembangkan bentuk monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan;
- Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan;
- Pengumpulan data pemohon dan data penerbitan izin;
- Penyusunan dan merumuskan rencana kegiatan;
- Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bidang; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Bone sesuai Perda Nomor 8 Tahun 2016 sebagaimana disebutkan diatas adalah sebagai berikut :

- Kepala dinas
- Sekretaris
- Sub bagian umum dan kepegawaian;
- Sub bagian program;
- Sub bagian keuangan.
- Bidang pengkajian, pengembangan dan kebijakan penanaman modal
  - Seksi pengkajian dan pengembangan penanaman modal;
  - Seksi pengembangan penanaman modal; dan
  - Seksi pendidikan dan pelatihan penanaman modal

- 
- Bidang kerjasama, promosi dan pelayanan penanaman modal
    - Seksi kerjasama penanaman modal;
    - Seksi promosi penanaman modal; dan
    - Seksi pelayanan penanaman modal
  - Bidang data, sistem informasi, pengendalian dan pelaksanaan penanaman modal
    - Seksi data dan potensi penanaman modal;
    - Seksi informasi penanaman modal; dan
    - Seksi pengendalian dan pelaksanaan penanaman modal.
  - Bidang informasi, pengaduan dan pelayanan perizinan
    - Seksi pelayanan informasi dan pengaduan perizinan; dan
    - Seksi pelayanan pendaftaran ndan penyerahan perizinan
  - Bidang pengkajian dan pemrosesan perizinan
    - Seksi pengkajian dan penelitian perizinan; dan
    - Seksi penerbitan dan pengarsipan perizinan
  - Bidang monitoring dan evaluasi
    - Seksi monitoring penyelenggaraan perizinan;
    - Seksi evaluasi dan pelaporan perizinan;
    - Seksi pengawasan dan pengendalian perizinan.
  - UPTD
  - Kelompok jabatan pelaksana dan jabatan fungsional

Untuk lebih jelas dari susunan organisasi dapat dilihat pada struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone.

Susunan Kepegawaian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dalam menjalankan roda organisasi sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya dan perlengkapan yang dimiliki yang merupakan elemen penting dalam menggerakkan organisasi sekaligus sebagai faktor yang berpengaruh dan menentukan dalam mencapai tujuan organisasi. Susunan kepegawaian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone dikelompokkan menurut golongan kepangkatan, tingkat pendidikan dan eselon.

- Menurut golongan kepangkatan, pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone dapat dikelompokkan menjadi :
  - Golongan IV : 9 orang
  - Golongan III : 20 orang
  - Golongan II : 1 orang
  - Pegawai Tidak Tetap: 46 orang
- Menurut tingkat pendidikan, pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone dapat dikelompokkan menjadi :

*Tabel 1*  
*SDM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menurut tingkat pendidikan*

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	PNS	NON PNS	JUMLAH
1	Pasca Sarajana	7	3	10
2	Sarjana	21	32	53
3	Diploma 3 (D3)	1		1
4	SMA	1	11	12
Total		30	46	74

- Menurut eselon, pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone dapat dikelompokkan menjadi :

- Eselon II : 1 orang
- Eselon III : 7 orang
- Eselon IV : 18 orang
- Non Eselon : 4 orang

*Tabel 1.2*  
*Jumlah SDM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bone Tahun 2018*

No.	Pendidikan	Jumlah	No.	Gol.	Jumlah	No.	Jabatan	Jumlah
1	SD	-	1	I	-	1	Struktural	26
2	SMP	-	2	II	1		- Eselon II	1
3	SMA	1	3	III	20		- Eselon III	7
4	Diploma 1	-	4	IV	9		- Eselon IV	18
5	Diploma 2	-				2	Fungsional	
6	Sarmuda/D3	1						
7	Strata 1	21						
8	Strata 2	7						
						3	Staf	4
Jumlah		30	Jumlah		30	Jumlah		30

Tenaga ASN sebanyak 30 orang terdiri dari :

- a. Sarjana (S2) : 7 (Tujuh) Orang
- b. Sarjana (S1) : 21 (Dua Puluh Satu) Orang
- c. Diploma III (D3) : 1 (Satu) Orang
- d. SMU / Sederajat : 1 (Dua) Orang

#### 1.4 ISU STRATEGIS

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance & clean government*) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah pada Kab. Bone merupakan sasaran utama pelaksanaan pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bone.

Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bone guna pencapaian visi, misi

---

dan tujuan organisasi sebagai bagian dari Rencana Strategis Pencapaian *Visi Misi Bupati Bone periode tahun 2013-2018*, yaitu untuk mewujudkan *Masyarakat Bone Yang Sehat, Cerdas, Dan Sejahtera*, banyak dipengaruhi oleh aspek-aspek strategis berupa kekuatan dan kelemahan secara internal dan eksternal serta tantangan dan permasalahan yang harus dihadapi oleh organisasi.

Kekuatan dan kelemahan organisasi berdasarkan aspek strategis yang berpengaruh dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bone, terdiri dari :

**a) *Faktor Internal***

Kekuatan organisasi secara internal, yaitu :

- Kewenangan yang besar dengan dasar hukum yang jelas untuk melaksanakan tugas pelayanan perizinan kepada masyarakat dengan motto “*kalau bisa dipercepat kenapa harus diperlambat*”;
- Adanya pedoman kerja organisasi yang jelas dan terstruktur berupa Standar Operasional dan Prosedur (SOP) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- Dukungan dan komitmen penuh dari unsur pimpinan untuk meningkatkan kinerja di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- Motivasi kerja yang tinggi dari seluruh aparatur pemerintah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bone.

Kelemahan organisasi secara internal, yaitu :

- Masih terbatasnya kompetensi aparatur pemerintah dari segi kuantitas dan kualitas dibandingkan dengan beban kerja berdasarkan kemampuan SDM yang ada, khususnya dalam hal :

- 
- Pelaksanaan terhadap administrasi perkantoran dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
  - Pelaksanaan konsultasi dalam penyusunan dokumen perencanaan beserta laporan capaian kinerja dan keuangan, dan juga pengelolaan keuangan dan asset daerah.
- Terbatasnya sarana dan prasarana aparatur pemerintah dibandingkan dengan kebutuhan aparatur, khususnya ruangan gedung kantor beserta perlengkapan meubelurnya (meja dan kursi kerja), dan juga sarana operasional lapangan (kendaraan roda empat);

***b) Faktor Eksternal***

Kekuatan organisasi secara eksternal, yaitu :

- Dukungan dan komitmen secara penuh dari Bupati Bone selaku pengambil kebijakan tertinggi dalam pelaksanaan koordinasi tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bone atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di Kab. Bone;
- Dukungan kerjasama dan sinergitas dengan Aparat DPMPTSP dan Eksternal lainnya, baik dengan BPK-RI, BPKP, Muspida dan BKPM Propinsi;

Kelemahan organisasi secara eksternal, yaitu :

- Inkonsistensi beberapa Peraturan Perundang-Undangan dari pemerintah pusat dalam konteks otonomi/kewenangan daerah, khususnya yang terkait dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah, yang beberapa kali mengalami perubahan yang cukup cepat dalam kurun waktu 5 tahun terakhir;
- Terbatasnya Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah, yang mengatur secara lebih terinci terkait dengan prosedural teknis implementasi peraturan perundang-undangan dari pemerintah pusat yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kab. Bone.

---

Tantangan dan permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bone dalam pelaksanaan tupoksi organisasi, yaitu sebagai berikut :

- Masih kurangnya dukungan kebijakan maupun regulasi terhadap kegiatan promosi guna mendorong peningkatan iklim investasi di Kabupaten Bone;
- Masih rendahnya kegiatan pengkajian/penelitian yang berkaitan dengan pengembangan Investasi dan Penanaman Modal;
- Belum terwujudnya kerjasama yang sinergis antar Satuan Kerja Perangkat Daerah, dunia usaha maupun stakeholder terkait lainnya dalam pengembangan investasi dan penanaman modal;
- Secara kuantitas maupun kualitas kerjasama dalam pengembangan investasi dan penanaman modal masih belum sesuai harapan;
- Terbatasnya kuantitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia petugas lapangan perizinan;
- Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan surat izin baik berupa surat Izin Mendirikan Bangunan maupun surat izin lainnya yang wajib dimiliki;
- Masih adanya masyarakat yang memakai jasa calo untuk penerbitan surat izin khususnya Izin Mendirikan Bangunan;



---

## 1.5 INOVASI PELAYANAN PUBLIK

Inovasi menjadi kunci dalam reformasi birokrasi dan perbaikan kinerja pelayanan publik, oleh karena itu berbagai inovasi juga telah dikembangkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu. Salah satu inovasi yang dikembangkan adalah Pelayanan Izin secara on line melalui aplikasi SIMPEL yang dapat diakses melalui website [www.dpmpdsp.bone.go.id](http://www.dpmpdsp.bone.go.id) dan untuk tahun 2018 telah dikembangkan melalui aplikasi “*SIMPEL BONE*” yang dapat di download di playstore.

## 2.1 RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Bone Tahun 2013-2018 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone 2013-2018. Rencana Strategis (RENSTRA) sebagai dokumen perencanaan yang memuat penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran dan program SKPD selama 5 tahun yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

### 2.1.1 VISI :

Visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut.

***“Terwujudnya Iklim Investasi yang Kondusif menuju Bone sejahtera”***

Visi tersebut diuraikan kedalam frase sebagai berikut :

- Iklim investasi : semua kebijakan, kelembagaan, dan lingkungan, baik yang sedang berlangsung maupun yang diharapkan terjadi di masa datang, yang bisa mempengaruhi tingkat pengembalian dan resiko suatu investasi .
- Kondusif : memberi peluang pada hasil yang diinginkan yang bersifat mendukung;
- Masyarakat bone sejahtera merupakan penjabaran visi Kabupaten Bone.

### 2.1.2 MISI:

Adapun misi yang harus dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi tersebut adalah:

- Mewujudkan pelayanan prima
- Mewujudkan profesionalisme aparatur
- Mengoptimalkan potensi dan peluang investasi
- Mewujudkan koordinasi dan kerjasama penanaman modal

---

## Tujuan Dan Indikator Kinerja

Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun adalah, sebagai berikut:

Dengan telah dirumuskannya visi dan misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu maka perlu ditetapkan apa tujuan yang ingin dicapai dalam 5 tahun mendatang sebagai berikut :

- Tujuan Misi 1 : Mewujudkan Pelayanan Prima
  - Mewujudkan tata Kelola yang baik dalam penyelenggaraan pelayanan publik terkait perizinan
- Tujuan misi 2 : Mewujudkan profesionalisme aparatur
  - Mewujudkan tata Kelola yang baik dalam penyelenggaraan pelayanan publik terkait perizinan
- Tujuan misi 3 : Mengoptimalkan potensi dan peluang investasi
  - Meningkatkan Investasi di kabupaten Bone
- Tujuan misi 4 : Mewujudkan koordinasi dan kerjasama penanaman modal
  - Meningkatkan Investasi di kabupaten Bone

Dengan melihat hasil predikat evaluasi SAKIP Tahun 2013-2017 yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten, Provinsi dan Tim Evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi maka kami diharapkan untuk memperbaiki dokumen akuntabilitas yang menjadi bahan pengukuran Nilai SAKIP, untuk itu pada tahun 2018 kami melakukan perubahan Renstra yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Yang selanjutnya kami laporkan dalam penyusunan dokumen ini.

*Tabel 2.1*  
*Tujuan dan Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*

TUJUAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET AKHIR RENSTRA
Mewujudkan tata Kelola yang baik dalam penyelenggaraan pelayanan publik terkait perizinan	Predikat Evaluasi SAKIP Oleh APIP	Indeks		C
	Persentase Rumah Ber-IMB	Persen		70%
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks		A-
	Persentase Penanganan Pengaduan yang diselesaikan	Persen		100%
Meningkatkan Investasi di kabupaten Bone	Nilai PMDN / PMA per Tahun	Rupiah		120M

#### Sasaran Dan Indikator Kinerja

- Sasaran Misi 1 :Mewujudkan Pelayanan Prima
  - Meningkatnya standar dan mutu pelayanan;
- Sasaran misi 2 : Mewujudkan Profesionalisme Aparatur
  - Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja;
- Sasaran misi 3 : Mengoptimalkan potensi dan peluang investasi
  - Meningkatnya Nilai Investasi;
- Sasaran misi 4 : Mewujudkan koordinasi dan kerjasama penanaman modal
  - Meningkatnya Nilai Investasi;

Indikator kinerja dan target kinerja untuk masing-masing tujuan strategis diuraikan dalam tabel berikut ini:

*Tabel 2.2*  
*Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET AKHIR RENSTRA
Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja	Predikat Evaluasi SAKIP Oleh APIP	Indeks		C
Meningkatnya kualitas Pelayanan Perizinan	Persentase Rumah Ber-IMB	Persen		70%
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks		A-
	Persentase Penanganan Pengaduan yang diselesaikan	Persen		100%
Meningkatnya Nilai Investasi	Nilai PMDN per Tahun	Rupiah		120M

#### Program Untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perubahan RENSTRA, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program. Adapun program-program untuk mendukung masing-masing sasaran tahun 2018 sebagai berikut:

*Tabel 2.3*  
*Program Strategis Untuk Pencapaian Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kab. Bone*

SASARAN	PROGRAM STRATEGIS
Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan

SASARAN	PROGRAM STRATEGIS
Meningkatnya kualitas Pelayanan Perizinan	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
	Program Pengembangan Kemitraan
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat
Meningkatnya Nilai Investasi	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

## 2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan/sasaran dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kab. Bone telah menetapkan IKU sebagai berikut :

*Tabel 2.4*  
*Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Daerah Kab. Bone*

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN CAPAIAN KINERJA
I	Meningkatnya kualitas Pelayanan Perizinan	Persentase Rumah Ber-IMB	Persen	$\frac{\text{Jumlah Rumah ber IMB}}{\text{Jumlah Bangunan Rumah}} \times 100\%$
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat
I	Meningkatnya Nilai Investasi	Nilai PMDN / PMA per tahun	Rupiah	Nilai PMDN / PMA per tahun

Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut diatas merupakan Indikator Kinerja Utama Perubahan Renstra Tahun 2018 .

Sedangkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2018 - 2023 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati No 87 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bone , tanggal 13 November 2018 adalah sebagai berikut :

*Tabel 2.5*  
*Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2018-2023*

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN CAPAIAN KINERJA
I	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pelayanan Perizinan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat
		Persentase Rumah Ber-IMB	$\frac{\text{Jumlah Rumah ber IMB}}{\text{Jumlah Bangunan Rumah}} \times 100\%$
		Persentase Usaha Perdagangan yang dilengkapi izin usaha	$\frac{\text{Jumlah Usaha Perdagangan yang memiliki izin}}{\text{Jumlah Usaha Perdagangan}} \times 100\%$
II	Meningkatnya Nilai Investasi Penanaman Modal di Kabupaten Bone	Nilai PMDN / PMA per tahun	Nilai PMDN / PMA per tahun

### 2.3 PERJANJIAN KINERJA 2018

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi.. Perjanjian Kinerja ini berfungsi sebagai tolak ukur keberhasilan dan bahan evaluasi akuntabilitas pencapaian kinerja tahunan oleh Bupati Bone terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bone dalam rangka pencapaian Visi Dan Misi Pemerintah Kab. Bone.

Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja beserta program dan anggaran dalam satu tahun anggaran.

Penyusunan Perjanjian Kinerja tahun 2018 dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD Kab. Bone dan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2013-2018, Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2018, dan APBD Tahun Anggaran 2018.

Sebagai wujud komitmen Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bone dalam pencapaian target kinerja tahunan yang telah tercantum dalam Renja/RKT Tahun 2018, maka telah ditetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 yang ditandatangani bersama oleh Inspektur Daerah dengan Bapak Bupati Bone. (tersaji pada *Lampiran 1*).

*Tabel 2.6*  
*Ikhtisar Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bone Tahun 2018*

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
I	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja	Predikat Evaluasi SAKIP Oleh APIP	Indeks	C
II	Meningkatnya kualitas Pelayanan Perizinan	Persentase Rumah Ber-IMB	Persen	70%
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	A- 71 – 78
		Persentase Penanganan Pengaduan yang diselesaikan	Persen	100%
II	Meningkatnya Nilai Investasi	Nilai PMDN / PMA per tahun	Rupiah	120m

## 2.4 RENCANA ANGGARAN TAHUN 2018

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp. 5.681.162.831,- yang digunakan untuk membiayai Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Secara rinci rencana anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



*Tabel 2.7*  
*Anggaran Belanja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*  
*Kab. Bone Tahun 2018*

BELANJA	JUMLAH ANGGARAN	
	DPA No. 32 Tahun 2017	DPPA No. 05 Tahun 2018
	Tgl. 28 Desember 2017	Tgl. 11 Oktober 2018
1	2	3
PENDAPATAN ASLI DAERAH	Rp 3.900.000.000	Rp 4.600.000.000
BELANJA TIDAK LANGSUNG (Gaji & Tunjangan Pegawai)	Rp 3.105.851.300	Rp 2.581.162.831
BELANJA LANGSUNG	Rp 2.500.000.000	Rp 3.100.000.000
- Belanja Pegawai	Rp 203.200.000	Rp 140.850.000
- Barang dan Jasa	Rp 2.155.550.000	Rp 2.740.205.000
- Belanja Modal	Rp 141.250.000	Rp 218.945.000
TOTAL ANGGARAN	Rp 5.605.851.300	Rp 5.681.162.831

Anggaran belanja langsung senilai Rp. 3.100.000.000,- (setelah perubahan) untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2018, terdiri dari 10 Program dan 26 Kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018 dengan pengalokasian terhadap pencapaian sasaran, adalah sebagai berikut :

*Tabel 2.8*  
*Alokasi Anggaran Per Sasaran Dinas Penanaman Modal dan*  
*Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bone Tahun 2018*

SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2018	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN	%
Meningkatnya kualitas Pelayanan Perizinan	Persentase Rumah Ber-IMB	70%	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp 423.224.000	13,65%
	Persentase Usaha Perdagangan yang dilengkapi	45%	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber Pedapatan Daerah	Rp 423.224.000	-

SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2018	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN	%
	izin usaha				
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	A-71 – 78	<b>Program Pengembangan Kemitraan</b>	<b>Rp 139.233.000</b>	<u>4,49%</u>
			Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Rp 139.233.000	-
			<b>Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik</b>	<b>Rp 362.552.000</b>	<u>11,70%</u>
			Peninjauan Lokasi Layanan Perizinan	Rp 249.702.000	-
			Pelayanan Administrasi Perizinan dan Fasilitasi tenaga Front Office	Rp 108.125.000	-
			Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Bidang Pelayanan Perizinan	Rp 4.725.000	-
			<b>Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat</b>	<b>Rp 90.345.000</b>	3%
			Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat	Rp 80.095.000	
	Presentase Penanganan Pengaduan yang diselesaikan	85%	Penanganan Kasus Pengaduan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Rp 10.250.000	
Meningkatnya Nilai Investasi	Nilai PMDN per Tahun	120m	<b>Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi</b>	<b>Rp 22.240.000</b>	7%
			Penyusunan Kebijakan Investasi bagi Pembangunan Fasilitas Infrastruktur	Rp 110.000.000	
			Pengembangan System Informasi Penanaman Modal	Rp 112.240.000	
	Nilai PMA pertahun	500M	<b>Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi</b>	<b>Rp 462.250.000</b>	15%

SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2018	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN	%
			Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama di Bidang Penanaman Modal dengan Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha.	Rp 21.830.000	
			Peningkatan kualitas SDM guna Peningkatan Pelayanan Investasi	Rp 41.020.000	
			Peningkatan Kegiatan Pemantauan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp 31.400.000	
			Penyelenggaraan Pameran Investasi	Rp 368.000.000	
Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja	Predikat Evaluasi SAKIP Oleh APIP	C	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Rp 862.941.000</b>	28%
			Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 119.031.000	
			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Rp 137.290.000	
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rp 6.299.000	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan Undangan	Rp 13.300.000	
			Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah	Rp 260.000.000	
			Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Rp 327.021.000	
			<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Rp. 429.265.000,00</b>	14%
			Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Rp 218.945.000	
			Pemeliharaan Rutin /berkala Gedung Kantor	Rp 51.000.000	

SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2018	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN	%
			Pemerlihaaran Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Rp 116.270.000	
			Pemerlihaaran Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Rp 43.050.000	
			<b>Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Rp 98.075.000</b>	3%
			Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	Rp 55.075.000	
			Bimbingan Tekhnis Implementasi Peraturan Perundang undangan	Rp 43.000.000	
			<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan</b>	<b>Rp. 9.875.000,00</b>	0%
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 9.875.000	
<b>TOTAL</b>				<b>Rp3.100.000.000</b>	100,00%

Tabel tersebut diatas menjelaskan program dan kegiatan beserta anggarannya yang menjadi prioritas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bone dalam mencapai target indikator kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan berdasarkan Rencana Kerja (Renja/RKT) Tahun 2018 dan Perubahan Rencana Strategis Tahun 2018.

Dari tabel tersebut, jumlah anggaran untuk seluruh program dan kegiatan sebesar Rp. 3.100.000.000,-. Dari total 10 Program, 6 diantaranya adalah program prioritas yang secara strategis sangat menentukan pencapaian target indikator kinerja Kedua Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bone, dan 4 Program lainnya merupakan program rutin yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian seluruh sasaran yang ada. Persentase terbesar anggaran untuk mendukung Sasaran ke-1 dengan besaran 32,75% dari total anggaran belanja langsung. Pencapaian target indikator kinerja dari sasaran

---

ini dilaksanakan dengan satu Program Utama yaitu Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah. Sementara itu sasaran kedua , sebesar 22% dari total anggaran belanja langsung yang dilaksanakan dengan Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, *kedua sasaran tersebut memiliki presentase yang hampir sama*. Namun secara keseluruhan, kesepuluh program beserta kegiatan tersebut diatas, merupakan satu kesatuan yang saling mendukung satu sama lainnya dalam proses pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bone Tahun 2018.

Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bone Tahun 2018 diukur berdasarkan capaian kinerja organisasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bone pada tahun 2018. Akuntabilitas Kinerja ini menyajikan hasil pengukuran kinerja terhadap target capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja dari sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan beserta realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018 dan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2018.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal dengan pendekatan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai berikut :

*Tabel 3.1*  
*Skala Pengukuran Ordinal Kinerja*

NO	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	>100 %	Baik Sekali
2	$76 \% \leq 100\%$	Baik
3	$66 \% \leq 75 \%$	Cukup
4	$51 \% \leq 65 \%$	Kurang
5	$\leq 50\%$	Sangat Kurang

Berdasarkan tabel tersebut di atas, setiap indikator kinerja dari sasaran yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018, dapat dinilai kriteria realisasi kinerjanya berdasarkan persentase capaian kinerja yang diperoleh dari perbandingan antara realisasi kinerja dengan target kinerja yang telah ditetapkan.

---

### 3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Laporan Kinerja Tahun Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bone Tahun 2018 pada intinya mencakup data realisasi dan evaluasi hasil capaian kinerja organisasi pada tahun 2018. Hal ini diperoleh melalui analisis dan perbandingan capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja dari sasaran strategis dalam perjanjian kinerja tahun 2018. Tahapan evaluasi capaian kinerja dari tiap sasaran strategis, meliputi :

1. Perbandingan antara target dengan realisasi capaian kinerja tahun 2018;
2. Perbandingan antara realisasi capaian kinerja tahun 2018 dengan realisasi capaian kinerja tahun sebelumnya;
3. Perbandingan antara realisasi capaian kinerja hingga tahun 2018 dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis (Renstra) tahun 2013-2018;
4. Perbandingan realisasi capaian kinerja tahun 2018 dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan / kegagalan pencapaian target kinerja;
7. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Hasil evaluasi capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja dari setiap sasaran strategis dalam Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bone Tahun 2018, selanjutnya akan diuraikan berdasarkan ketujuh tahapan evaluasi capaian kinerja tersebut.

#### Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2018

Secara umum, realisasi capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bone Tahun 2018 telah memenuhi target kinerja dengan kategori Baik ( $76 \% \leq 100\%$ ), berdasarkan indikator sasaran yang terdiri dari 2 (dua) sasaran dengan 3 (lima) indikator sasaran ke- 1 dan dua indikator sasaran ke - 2 sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018. Realisasi capaian indikator kinerja Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bone dibandingkan dengan target dari setiap sasaran strategis, dapat dilihat pada tabel berikut :

Rincian tingkat capaian sasaran yang telah ditetapkan dengan melihat tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja diuraikan pada tabel berikut :

*Tabel 3.2*  
*Capaian Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2018.*

NO	SAARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018	REALISASI 2018	CAPAIAN (%)	KRITERIA KINERJA
I	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja	Predikat Evaluasi SAKIP Oleh APIP	c	cc	100%	Baik
II	Meningkatnya kualitas Pelayanan Perizinan	Persentase Rumah Ber-IMB	70%	70%	100%	Baik
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	A-71 - 78	78	100%	Baik
		Persentase Penanganan Pengaduan yang diselesaikan	100%	100%	100%	Baik
III	Meningkatnya Nilai Investasi	Nilai PMDN/PMA per Tahun	120m	135.925M	113%	Baik sekali
Rata-Rata Capaian Kinerja berdasarkan Indikator Sasaran					103%	Baik sekali

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Pemilihan dan Penetapan Indikator Kinerja Utama harus memenuhi karakteristik yaitu spesifik, dapat dicapai, relevan, menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur dan dapat dikuantifikasi dan diukur.



Capaian Pengukuran Indikator Kinerja Utama di Tahun 2018 dapat digambarkan melalui tabel di bawah ini:

*Tabel 3.3*  
*Capaian Indikator Kinerja Utama*

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2018	REALISASI 2018	CAPAIAN (%)
1	Persentase Rumah Ber-IMB	70%	70%	100,00%
2	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	A- 71 – 78	78	100%
3	Nilai PMDN / PMA per tahun	120m	135.925m	113%

#### Perbandingan Capaian Kinerja

Dari hasil pelaksanaan program/kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bone pada tahun 2018 sesuai dengan pernyataan kinerja yang telah diperjanjikan, maka untuk mengevaluasi capaian kinerjanya, dapat diketahui dengan melihat indikator-indikator kinerja yang terkait dengan sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Realisasi kinerja dari setiap indikator sasaran selanjutnya menjadi bahan evaluasi capaian kinerja organisasi. Evaluasi capaian kinerja dilakukan berdasarkan tujuh tahapan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, yang secara umum meliputi perbandingan dan analisis terkait realisasi kinerja dari setiap indikator kinerja sasaran strategis pada Tahun 2018.

Berdasarkan format Pengukuran Kinerja yang telah dibuat dengan merujuk pada Indikator Kinerja Utama (IKU), Perubahan Renstra Tahun 2018 dan RPJMD Tahun 2013-2018, maka Tingkat Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bone Tahun 2018 dapat dijelaskan melalui uraian perbandingan dan analisis realisasi kinerja dari tiap sasaran strategis berikut ini:

---

## **Sasaran Strategis Pertama :**

### **Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja**

#### 1. Perbandingan *Antara Target dan Realisasi Sasaran 1*

*Tabel 3.3.1*  
*Capaian Kinerja Sasaran 1- Tahun 2018*

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018	REALISASI 2018	CAPAIAN (%)
1	Predikat Evaluasi SAKIP Oleh APIP	C	CC	100%

#### 2. *Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2018 Dengan Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya dari Sasaran 1*

*Tabel 3.3.2*  
*Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1. Tahun 2016-2018*

INDIKATOR KINERJA	REALISASI CAPAIAN KINERJA		
	2016	2017	2018
Predikat Evaluasi SAKIP Oleh APIP			CC

Indikator sasaran 1 ini baru dilaksanakan pada perubahan Renstra Tahun 2018, sehingga pada kolom tahun 2016 dan 2017 diatas masih kosong (data tidak tersedia).

#### 3. *Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan.*

##### 1. Predikat Evaluasi SAKIP Oleh APIP

Predikat Evaluasi SAKIP merupakan indikator penilaian pencapaian kinerja organisasi yang penilaiannya berdasarkan pada dokumen RENSTRA, RENJA, RKA, DPA, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Pada tahun 2018 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menargetkan predikat C dan berhasil mencapai nilai CC hal ini merupakan suatu predikat yang masih jauh dari baik dikarenakan masih kurangnya pemahaman aparat dalam penyusunan dokumen perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.

## 2. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dari Sasaran 1

*Tabel 3.3.3*  
*Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Capaian Kinerja Sasaran 1*

NO	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA	REALISASI ANGGARAN 2018	EFISIENSI
1	2	3	4	(3-4)
1	Predikat Evaluasi SAKIP Oleh APIP	100%	97%	3%

Efisiensi penggunaan sumber daya anggaran untuk pencapaian kinerja sasaran ini baik dengan nilai efisiensi sebesar 3%, dimana realisasi penggunaan anggarannya (sebesar 97%) lebih kecil nilainya dibandingkan dengan persentase realisasi capaian kinerjanya (sebesar 100%).

## 3. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja Sasaran 2

*Tabel 3.3.4*  
*Program dan Kegiatan Penunjang Capaian Kinerja Sasaran 2*

NO	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Predikat Evaluasi SAKIP Oleh APIP	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 119.031.000	Rp.113.909.000	96%
2			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Rp 137.290.000	Rp.136.628.788	100%
3			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rp 6.299.000	Rp.6.299.000	100%

NO	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
4			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan Undangan	Rp 13.300.000	Rp.12.100.000	91%
5			Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah	Rp 260.000.000	Rp.259.466.189	100%
6			Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Rp 327.021.000	Rp.319.901.000	98%
7		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Rp 218.945.000	Rp.217.538.750	99%
8			Pemeliharaan Rutin /berkala Gedung Kantor	Rp 51.000.000	Rp.51.000.000	100%
9			Pemerlihaaran Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Rp 116.270.000	Rp.115.146.140	99%
10			Pemerlihaaran Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Rp 43.050.000	Rp.43.050.000	100%
11		<b>Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	Rp 55.075.000	Rp.55.075.000	100%
12			Bimbingan Tekhnis Implementasi Peraturan Perundang undangan	Rp 43.000.000	Rp.19.689.498	46%
13		<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan</b>	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 9.875.000	Rp.9.875.000	100%
<b>JUMLAH</b>				<b>Rp1.400.156.000</b>	<b>Rp1.359.678.365</b>	<b>97%</b>

---

Dari keempat program pada tabel diatas yang merupakan program strategis yang dilaksanakan untuk pencapaian kinerja Indikator sasaran ini adalah Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dimana output dari kegiatan pada program ini adalah penyusunan laporan kinerja, namun demikian selain program tersebut juga terdapat tiga program pendukung lainnya yang sangat berperan dalam pencapaian indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu satu Pintu.

Tujuan dari program ini adalah untuk Mewujudkan tata Kelola yang baik dalam penyelenggaraan pelayanan publik terkait perizinan. Adapun Indikator Kinerja dari sasaran ini dapat dilihat pada tabel di atas yaitu Persentase masing masing indikator mencapai hampir rata rata mencapai 100%.

Adapun alokasi anggaran untuk mendukung keempat program ini adalah sebesar Rp. 1.400.156.000 realisasi sebesar Rp. 1.359.678.365 atau 97% dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mencapai sasaran ini adalah :

1. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
  2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
  3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
  4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan Undangan
  5. Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah
  6. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran
  7. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
  8. Pemeliharaan Rutin /berkala Gedung Kantor
  9. Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional
  10. Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor
  11. Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan
  12. Bimbingan Tekhnis Implementasi Peraturan Perundang undangan
  13. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
4. *Permasalahan dan Alternatif Solusi*
- Meskipun pencapaian pada sasaran ini sudah memenuhi target bahkan melebihi predikat yang ditargetkan namun demikian pencapaian tersebut

---

masih sangat jauh dari yang diharapkan hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman aparat tentang penyusunan dokumen perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program kegiatan.

Untuk itu perlu keikutsertaan aparat dalam pelatihan atau bimbingan teknis terkait penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan perlu terus ditingkatkan mengingat peraturan peraturan terkait penyusunan tersebut terus menerus mengalami perubahan.

**Sasaran Strategis Kedua :**

**Meningkatnya kualitas Pelayanan Perizinan**

*1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Sasaran 2*

*Tabel 3.4.1  
Capaian Kinerja Sasaran 2- Tahun 2018*

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018	REALISASI 2018	CAPAIAN (%)
1	Persentase Rumah Ber-IMB	70%	70%	100%
3	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	A- 71 – 78	78	100%
4	Presentase Penanganan Pengaduan yang diselesaikan	85%	100%	100%

*2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2018 Dengan Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya dari Sasaran 2*

*Tabel 3. 4.2*  
*Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2. Tahun 2016-2018*

INDIKATOR KINERJA	REALISASI CAPAIAN KINERJA		
	2016	2017	2018
Persentase Rumah Ber-IMB	55%	70%	70 %
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	B	B	A-
Presentase Penanganan Pengaduan yang diselesaikan			100%

Ketiga indikator kinerja pada tabel diatas merupakan indikator baru pada perubahan Renstra 2018 namun demikian untuk data realisasi capaian pada indikator kesatu dan kedua sudah kami laksanakan setiap tahun, karena kurangnya pemahaman kami tentang penetapan indikator kinerja sasaran maka hal tersebut baru kami masukkan pada perubahan Renstra Tahun 2018.

### 3. *Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan.*

#### 1. Persentase Rumah Ber-IMB

Presentase Rumah Ber IMB merupakan indikator pendukung pencapaian target Pendapatan Asli Daerah terkait retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang selama ini dibebankan pada OPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan realisasi pencapaiannya seringkali melebihi target dimana pada Tahun 2018 mencapai 106,6%, capaian target tersebut merupakan salah satu keberhasilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam hal peningkatan Standar dan Mutu Pelayanan, dimana dalam hal ini tingkat kesadaran masyarakat dalam kepemilikan Izin khususnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dan izin Usaha Perdagangan dari Tahun ke Tahun semakin meningkat.

---

Keberhasilan ini tidak terlepas dari dukungan anggaran serta komitmen aparat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu beserta Instansi teknis yang terkait pemberian rekomendasi penerbitan izin .

Adapun beberapa hal yang menjadi pendukung keberhasilan tersebut antara lain :

- Pengembangan Aplikasi perizinan online yang memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi tentang perizinan terkait ; Persyaratan, simulasi perhitungan retribusi, pendaftaran perizinan secara online dan pengaduan secara online.
- Sosialisasi Peraturan perundangan kepada masyarakat terkait perizinan dan penanaman modal;

## 2. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat,

Indikator ini merupakan salah satu Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat dalam pelayanan publik terkait perizinan. Nilai kepuasan masyarakat sejak tahun 2016 mengalami peningkatan hal ini dapat dilihat dari tabel yang disajikan diatas.

Penyebab peningkatan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat tersebut tidak terlepas dari dukungan anggaran yang dialokasikan untuk meningkatkan pelayanan publik terkait perizinan, selain itu komitmen dan kerjasama dari setiap unsur dalam hal ini beberapa Tim Teknis yang mendukung proses kajian penerbitan izin sehingga izin diterbitkan sesuai SOP yang merupakan salah satu indikator penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat. Meskipun masih ada beberapa pengaduan masyarakat yang merasa tidak puas dengan pelayanan yang kami lakukan akan tetapi hal tersebut merupakan tantangan bagi kami untuk terus melakukan inovasi dalam hal pelayanan publik terkait perizinan.

Pengawasan terhadap kerjasama beberapa Tim Teknis yang terkait dengan penerbitan izin juga akan terus ditingkatkan sehingga



ditahun tahun selanjutnya pengaduan perizinan terus mengalami penurunan.

3. Presentase Penanganan Pengaduan yang diselesaikan.

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa pelaksanaan pengukuran pencapaian indikator tersebut baru kami laksanakan di Tahun 2018, akan tetapi ditahun tahun sebelumnya penanganan pengaduan terkait pelayanan perizinan umumnya segera kami tindak lanjuti dan terus menerus kami kembangkan dengan membuka ruang pengaduan selain dengan kotak aduan yang disediakan dalam ruang tunggu Kantor Pelayanan Perizinan juga kami siapkan dalam salah satu kolom website Dinas Penanaman Modal serta Aplikasi Layanan perizinan dalam hal ini kami beri nama SIMPEL, hal tersebut kami lakukan mempermudah masyarakat dalam menyampaikan pengaduan ke kantor kami sebagaimana motto kami “*Pengaduan Anda Adalah Tantangan Bagi Kami*”.

4. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dari Sasaran 2

Tabel 3.4.3  
*Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Capaian Kinerja Sasaran 2*

NO	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA	REALISASI ANGGARAN 2018	EFISIENSI
1	2	3	4	(3-4)
1	Persentase Rumah Ber-IMB	100%	96%	4%
2	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	100%	94,21%	5,79%
3	Presentase Penanganan Pengaduan yang diselesaikan	100%	100%	0

Efisiensi penggunaan sumber daya anggaran untuk pencapaian kinerja sasaran ini baik karena rata rata realisasi penggunaan anggarannya (sebesar lebih kecil dibandingkan dengan persentase realisasi capaian kinerjanya).

5. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja Sasaran 2

*Tabel 3.4.5*  
*Program dan Kegiatan Penunjang Capaian Kinerja Sasaran 2*

NO	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Persentase Rumah Ber-IMB	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber sumber Pedapatan Daerah	Rp 423.224.000	Rp 408.624.000	97%
		Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Peninjauan Lokasi Layanan Perizinan	Rp 49.702.000	Rp 236.492.000	95%
2	Persentase Usaha Perdaganganan yang dilengkapi izin usaha	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Pelayanan Administrasi Perizinan dan Fasilitasi tenaga Front Office	Rp 108.125.000	Rp 105.950.000	98%
3	Persentase Usaha Perdaganganan yang dilengkapi izin usaha	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Bidang Pelayanan Perizinan	Rp 4.725.000	Rp 4.725.000	100%
4	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat	Rp 80.095.000	Rp 75.455.000	94%
5	Presentase Penanganan Pengaduan yang diselesaikan	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Penanganan Kasus Pengaduan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Rp 10.250.000	Rp 10.250.000	100%
		Program Pengembangan Kemitraan	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Rp 139.233.000	Rp 132.228.000	95%
TOTAL				Rp1.015.354.000	Rp 973.724.000	96%

Program strategis yang dilaksanakan untuk pencapaian kinerja indikator sasaran ini adalah Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Program

---

Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Program Pengembangan Kemitraan.

Tujuan dari keempat program ini adalah untuk Mewujudkan tata Kelola yang baik dalam penyelenggaraan pelayanan publik terkait perizinan. Adapun Indikator Kinerja dari sasaran ini dapat dilihat pada tabel di atas yaitu Persentase masing masing indikator mencapai hampir rata rata mencapai 100%.

Adapun alokasi anggaran untuk mendukung keempat program ini adalah sebesar Rp. 1.015.354.000 realisasi sebesar Rp. 973.724.000 atau 96% dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mencapai sasaran ini adalah :

1. Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber sumber Pedapatan Daerah;
2. Peninjauan Lokasi Layanan Perizinan
3. Pelayanan Administrasi Perizinan dan Fasilitasi tenaga Front Office
4. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Bidang Pelayanan Perizinan
5. Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat;
6. Penanganan Kasus Pengaduan pelayanan terpadu satu pintu
7. Monitoring dan Evaluasi

#### 8. *Permasalahan dan Alternatif Solusi*

Meskipun capaian pada sasaran 1 ini sudah optimal namun masih tetap ada permasalahan di lapangan antara lain rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengurusan izin baik Izin Mendirikan Bangunan maupun izin usaha, namun untuk mengatasi hal tersebut Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melaksanakan pengawasan langsung ke masyarakat juga mengadakan sosialisasi peraturan perundang undangan tentang perizinan, serta pengembangan aplikasi perizinan online untuk memudahkan masyarakat dalam pengurusan izin.

---

### Sasaran 3 : Meningkatnya Nilai Investasi

#### 1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Sasaran 3

*Tabel 3.5.1*  
*Capaian Indikator Kinerja Sasaran 3*

No	Indikator Kinerja	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian Kinerja
1	Nilai PMDN / PMA per Tahun	120m	135.925m	113%

#### 2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Sebelumnya

*Tabel 3.5.2*  
*Perkembangan Capaian Indikator Kinerja*

INDIKATOR KINERJA	REALISASI CAPAIAN KINERJA		
	2016	2017	2018
Nilai PMDN / PMA per Tahun	52.275M	263.100M	135.925M

#### 3. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan.

Nilai PMDN / PMA per tahun

Berdasarkan tabel diatas capaian target dari kegiatan ini sudah mencapai target bahkan ditahun 2018 mengalami pencapaian melebihi 100 persen hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan kegiatan Promosi terkait potensi iklim investasi di Kabupaten Bone sudah mulai membaik khususnya dalam menarik Investor dalam negeri sedangkan dari sisi investor Penanaman Modal Asing (PMA) sangat belum optimal hal ini dapat dilihat dari presentase capaian target pada tabel diatas.

Pada tabel perbandingan perkembangan capaian kinerja diatas dapat kita lihat pencapaian pada tahun 2018 sedikit agak menurun dibanding pencapaian pada Tahun 2018 hal ini disebabkan karena di Tahun 2017 sedang berlangsung Pembangunan Gedung Pendidikan Kampus II STAIN Watampone yang nilai investasinya mencapai kurang lebih 100M.

#### 4. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

*Tabel 3.5.3*  
*Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Pada Sasaran 3*

NO	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA	REALISASI ANGGARAN 2018	EFISIENSI
1	2	3	4	(3-4)
1	Nilai PMDN per Tahun	113%	100%	13%

Pencapaian kinerja indikator Nilai PMDN mampu menunjang pencapaian kinerja nilai PMA dengan Rata-rata capaian kinerja pada sasaran ini adalah 113%, jika dibandingkan dengan persentase realisasi keuangannya yaitu 100% maka efisiensi penggunaan sumber daya sasaran 3 adalah 13%.

#### 5. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

*Tabel 3.5.4*  
*Program dan Kegiatan Penunjang Capaian Kinerja Sasaran 3*

NO	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Nilai PMDN / PMA per Tahun	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Penyusunan Kebijakan Investasi bagi Pembangunan Fasilitas Infrastruktur	Rp 110.000.000	Rp 109.853.500	100%
			Pengembangan System Informasi Penanaman Modal	Rp 112.240.000	Rp 112.215.000	100%
		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama di Bidang Penanaman Modal dengan Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha.	Rp 21.830.000	Rp 21.830.000	100%

NO	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
			Peningkatan Kegiatan Pemantauan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp 31.400.000	Rp 31.400.000	100%
			Peningkatan kualitas SDM guna Peningkatan Pelayanan Investasi	Rp 41.020.000	Rp 41.020.000	100%
			Penyelenggaraan Pameran Investasi	Rp 368.000.000	Rp 367.885.300	100%
TOTAL				Rp 684.490.000	Rp 684.203.800	100%

Program strategis yang dilaksanakan untuk pencapaian kinerja sasaran ini adalah Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi *dan* Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi melalui kegiatan :

- Penyusunan Kebijakan Investasi bagi Pembangunan Fasilitas Infrastruktur
  - Pengembangan System Informasi Penanaman Modal
  - Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama di Bidang Penanaman Modal dengan Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha.
  - Peningkatan Kegiatan Pemantauan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
  - Peningkatan kualitas SDM guna Peningkatan Pelayanan Investasi
  - Penyelenggaraan Pameran Investasi

Tujuan dari program pada sasaran ini adalah Meningkatkan Investasi di kabupaten Bone. Kegiatan yang dilakukan untuk pencapaian output kinerja berupa keikutsertaan dalam pameran pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten, Provinsi dan Pusat. Selain itu pengembangan sistem pelayanan perizinan bagi investor juga sangat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dari sasaran ini.

Terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan untuk sasaran ini, tidak terdapat permasalahan yang berarti dari segi penyerapan anggaran, namun dari segi pencapaian output kinerja, yang belum optimal adalah belum berhasilnya

mendatangkan Penanam Modal Asing (PMA) meskipun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sudah melebihi target yang direncanakan.

### 3.2. REALISASI ANGGARAN

Gambaran Umum Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kab. Bone

Anggaran pelaksanaan program dan kegiatan untuk mendukung pencapaian target indikator kinerja sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bone pada tahun 2018 hanya bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBD Kab. Bone T.A. 2018. Nilai pagu anggaran tahun 2018 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, seperti tergambar pada tabel berikut :

*Tabel 3.6.1  
Pagu Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu  
Kab. Bone Tahun 2017 dan 2018*

JENIS BELANJA	PAGU ANGGARAN (Berdasarkan Dokumen Perubahan Anggaran-DPPA)		
	Tahun 2017	Tahun 2018	% Kenaikan /(Penurunan)
BELANJA TIDAK LANGSUNG (Gaji & Tunjangan Pegawai)	Rp 1.819.670.500	Rp 2.581.162.831	42,00%
BELANJA LANGSUNG (Program dan Kegiatan)	Rp 3.150.000.000	Rp 3.100.000.000	-2,00%
- Belanja Pegawai	Rp 324.345.000	Rp 140.850.000	-57%
- Belanja Barang/Jasa	Rp 2.667.155.000	Rp 2.740.205.000	3,00%
- Belanja Modal	Rp 158.500.000	Rp 218.945.000	38,00%
TOTAL ANGGARAN	Rp 4.969.670.500	Rp 5.681.162.831	14,00%

Perbandingan alokasi anggaran belanja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kab. Bone terhadap total anggaran belanja pada APBD T.A. 2014-2018, dapat dilihat pada tabel berikut :

*Tabel 3.6.2*  
*Alokasi Anggaran Belanja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu terhadap APBD Kab. Bone T.A. 2018*

TAHUN ANGGARAN	PAGU ANGGARAN BELANJA			
	DPPA DPMPTSP		APBD-P Kab. Bone	% Terhadap APBD
2014	Rp	2.210.340.900	Rp 1.621.565.104.168	0,0013%
2015	Rp	2.310.316.200	Rp 2.020.021.255.842	0,0011%
2016	Rp	3.592.951.200	Rp 2.182.915.567.776	0,0016%
2017	Rp	4.969.670.500	Rp 2.335.930.580.063	0,0021%
2018	Rp	5.681.162.831	Rp 2.353.404.828.655	0,0024%

Secara proporsional, anggaran untuk peningkatan pelayanan publik yang mendukung peningkatan Investor di Kabupaten Bone belum optimal, dilihat dari beban kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai pusat pelayanan perizinan satu pintu, pengembangan iklim investasi dan pemungut retribusi Izin Mendirikan Bangunan. Namun, hal tersebut tidaklah menjadi alasan bagi Seluruh Aparat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kab. Bone untuk selalu melaksanakan tugas dan fungsinya seoptimal mungkin demi mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean government) dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Bupati Bone terpilih periode tahun 2013-2018.

#### Realisasi Keuangan Tahun 2018

Adapun realisasi keuangan belanja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bone pada tahun anggaran 2018 mencapai nilai penyerapan anggaran sebesar Rp. 7.002.440.169,-, atau 91,31 % dari total pagu anggaran, yang rinciannya tersaji pada tabel berikut ini :

*Tabel 3.6.3*  
*Realisasi Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bone Tahun 2018*



BELANJA	ANGGARAN	REALISASI	PERSEN
BELANJA TIDAK LANGSUNG	Rp 2.581.162.831	Rp 2.281.617.898	88%
(Gaji & Tunjangan Pegawai)			
BELANJA LANGSUNG	Rp 3.100.000.000	Rp 3.017.606.165	97%
- Belanja Pegawai	Rp 140.850.000	Rp 127.800.000	91%
- Barang dan Jasa	Rp 2.740.205.000	Rp 2.672.267.415	98%
- Belanja Modal	Rp 218.945.000	Rp 217.538.750	99%
TOTAL ANGGARAN	Rp 5.681.162.831	Rp 5.299.224.063	93%

#### Pemanfaatan Anggaran Tahun 2018

Pemanfaatan anggaran kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bone yang sepenuhnya bersumber dari DAU APBD Kab. Bone T.A. 2018, tergambar secara umum pada tabel diatas, dengan rincian penjelasan sebagai berikut :

##### 1) *Belanja Tidak Langsung*

Realisasi anggaran belanja tidak langsung Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bone pada Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.2.281.617.898,- (88%), digunakan hanya untuk pembayaran gaji dan tunjangan PNS selama satu tahun anggaran, termasuk Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) & Tunjangan Beban Kerja, yang berlaku setelah perubahan anggaran untuk 3 bulan terakhir (Oktober s.d. Desember 2019).

##### 2) *Belanja Langsung*

Realisasi anggaran belanja langsung Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bone pada Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 3.017.606.165,- (97%), digunakan untuk pelaksanaan 10 program dan 26 kegiatan pada tahun 2018. Realisasi anggaran terbesar untuk belanja langsung dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan prioritas yaitu Peningkatan Pendapatan Asli Daerah terkait Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat dan Pengembangan Iklim Investasi.

Dalam manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah, LKj menjadi bagian dari upayapertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, LKj akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

LKj bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu juga menjadi punya makna strategis, sebagai bagian dari penerjemahan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun pelaporan 2018, namun juga melihat tren pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir RENSTRA. Secara umum, nampak bahwa kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun 2018 adalah sangat baik, karena terdapat 2 indikator memenuhi kriteria sangat tinggi.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan penetapan kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam RENSTRA dan RENCANA KERJA (RENJA) 2018, yang mencakup juga penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya. Juga mencakup bukan hanya sekedar pelaksanaan program/kegiatan yang rutin dilakukan, namun juga pengembangan inovasi dalam berbagai bentuk.

Namun demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ke depan,

---

dalam hal ini keterampilan aparatur dalam mengoperasikan komputer/ laptop masih sangat minim sehingga dianggap menghambat pelayanan perizinan khususnya layanan perizinan online, sarana dan prasarana penunjang pelayanan perizinan dan penanaman modal masih belum cukup untuk memberikan pelayanan sesuai SOP.

Bagi instansi di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sendiri, ini bisa berarti perlunya peningkatan efektivitas dan pencapaian kinerja sehingga beberapa tantangan ini bisa dijawab.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja pemerintah daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan LKj, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh instansi di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaannya. Hal ini akan menjadikan LKj benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik.